

COMMUNITY EMPOWERMENT IN PREVENTION AND STUNTING MANAGEMENT IN LAMPOKO VILLAGE, BALUSU DISTRICT, BARRU REGENCY

Adrianah

adrianahidris@gmail.com

Andi Muhammad Ishak Ismail

STIA Al Gazali Barru
amishak@Algazali.ac.id

A. Pananrangi M

STIA Al Gazali Barru
apananrangi@Algazali.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine community empowerment in the prevention and control of stunting in Lampoko Village, Balusu District, Barru Regency. In this study used the type of qualitative research. The results showed that community empowerment carried out by the Lampoko Village Government, Balusu District, Barru Regency in preventing and tackling stunting was carried out jointly with puskesmas, Posyandu cadres, dasa wisma groups, PKK women and village community leaders. Then community empowerment has been carried out by the Lampoko Village Government, Balusu District, Barru Regency through 3 stages, namely: community awareness, transformation of community knowledge and skills, and community empowerment. All these stages of empowerment have succeeded in increasing the ability of the community itself based on the community's own potential to understand stunting on how to prevent and overcome it. In other words, community empowerment in preventing and tackling stunting carried out by the Lampoko Village Government, Balusu District, Barru Regency has gone quite well.

Keywords: Community empowerment, prevention and control of stunting

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN STUNTING DI DESA LAMPOKO KECAMATAN BALUSU
KABUPATEN BARRU**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan stunting di Desa Lampoko Kecamatan Balusu Kabupaten Barru. Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lampoko Kecamatan Balusu Kabupaten Barru dalam mencegah dan menanggulangi stunting dilakukan secara bersama-sama dengan puskesmas, kader Posyandu, kelompok dasa wisma, Ibu PKK dan tokoh masyarakat desa. Kemudian pemberdayaan masyarakat telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Lampoko Kecamatan Balusu Kabupaten Barru melalui 3 tahapan yakni: penyadaran masyarakat, transformasi kemampuan pengetahuan masyarakat dan keterampilan, dan pendayaan masyarakat. Seluruh tahapan pemberdayaan tersebut telah berhasil meningkatkan kemampuan masyarakat sendiri berdasarkan potensi masyarakat sendiri untuk memahami stunting tentang bagaimana pencegahan dan penanggulangannya. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi stunting yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lampoko Kecamatan Balusu Kabupaten Barru telah berjalan dengan cukup baik.

Kata kunci: Pemberdayaan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan stunting

A. PENDAHULUAN

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar setiap manusia, sebab jika sakit akan sulit melakukan aktivitas apapun untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu pembangunan kesehatan telah menjadi perhatian pemerintah sejak lama sebagai bagian dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Hal tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2009 Tentang Kesehatan ditegaskan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian juga dijelaskan bahwa setiap kegiatan dalam upaya

untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.

Meskipun perhatian pemerintah cukup tinggi, tetapi tantangan kesehatan hampir tidak pernah lepas dari permasalahan. Seperti yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan RI, (2017) bahwa saat ini Indonesia masih menghadapi permasalahan gizi yang berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM). Salah satu masalah kekurangan gizi yang masih cukup tinggi di Indonesia adalah pendek (*stunting*) dan kurus (*wasting*) pada balita serta masalah anemia dan kurang energi kronik (KEK) pada ibu hamil. Masalah kekurangan gizi pada ibu hamil tersebut pada akhirnya dapat menyebabkan berat badan bayi lahir rendah (BBLR) dan kekurangan gizi pada balita. Permasalahan gizi disebabkan oleh penyebab langsung seperti asupan makanan yang tidak adekuat dan penyakit infeksi. Sedangkan penyebab tidak langsung permasalahan gizi adalah masih tingginya kemiskinan, rendahnya sanitasi lingkungan,

ketersediaan pangan yang kurang, pola asuh yang kurang baik, dan pelayanan kesehatan yang belum optimal

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, (2017; 3) menyatakan bahwa hasil dari South East Asian Nutrition Survey (Seanuts) pada tahun 2010-2011 menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah anak balita pendek terbesar, jauh diatas Malaysia, Thailand serta Vietnam. Pada tahun 2010, gambaran tinggi standar anak usia 5 tahun adalah 110 centimeter, namun tinggi rata-rata anak Indonesia umur 5 tahun, kurang 6,7 centimeter untuk anak laki-laki dan kurang 7,3 centimeter untuk anak perempuan. Kejadian gagal tumbuh yang terjadi pada usia balita akan berlanjut ke usia berikutnya. Besar kemungkinan ketika mereka menginjak usia 19 tahun, maka tinggi badan optimal tidak tercapai. Mereka akan menjadi manusia dewasa yang pendek dengan keterbatasan untuk berproduktivitas optimal.

Melihat kondisi tersebut, pemerintahan telah melakukan berbagai langkah kebijakan untuk menekan angka *stunting*. melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Regulasi ini bermaksud sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mempercepat penurunan

stunting, pemerintah telah menerbitkan. Perpres ini merupakan payung hukum bagi Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan Stunting yang telah diluncurkan dan dilaksanakan sejak tahun 2018. (Sekertariat Wakil Presiden Republik Indonesia. 2021)

Pada tahun 2017 pemerintah telah meluncurkan program Rencana Aksi Nasional Penanganan stunting pada tingkat nasional, daerah terutama desa. Program ini diprioritaskan pada penanganan gizi spesifik dan sensitive pada 1000 hari pertama kehidupan sampai dengan anak usia 6 tahun. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya (Uliyatul Laili dan Ratna Ariesta Dwi Andriani. 2019: 9)

Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 37,2 %. Berdasarkan Pemantauan Gizi Tahun 2016, mencapai 27,5% sedangkan WHO memberikan batasan untuk stunting adalah < 20%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan yang tidak maksimal dialami oleh sekitar 8,9 juta anak di Indonesia atau 1 dari 3 anak mengalami stunting. Selain itu lebih dari 1/3 anak

berusia dibawah 5 tahun di Indonesia tinggai badannya di bawah rata-rata. (Buku Saku Desa Dalam Penanganan Stunting. 2017. Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 2017).

Menurut Siti Haryani dkk (2021:) bahwa kondisi Stunting dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor gizi buruk, kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi, masih terbatasnya layanan kesehatan, masih kurangnya akses kepada makanan bergizi dan kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh stunting diantaranya adalah Jangka pendek adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh, dalam jangka panjang akibat buruk yang dapat ditimbulkan adalah menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, dan resiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua

Asupan gizi yang dibutuhkan untuk mencegah stunting berupa asupan gizi yang baik saat hamil, konsumsi tablet penambah darah yang cukup saat hamil, pemberian ASI kepada anak selama 6

bulan pertama, dan dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI yang tepat sampai anak berusia 2 tahun. Faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kejadian stunting adalah kemampuan tenaga kesehatan dalam mendeteksi kondisi stunting sejak dini, kebersihan air dan lingkungan, pola pengasuhan anak, tempat persalinan dan genetik (Sri Astuti dkk. 2018).

Dalam rangka percepatan penurunan angka stunting, pemerintah menetapkan 1.000 desa prioritas intervensi stunting yang berada di 100 kabupaten/kota dan 34 provinsi. Penetapan 100 kabupaten/kota prioritas ditentukan dengan melihat indikator jumlah balita stunting (Riskesdas 2013), prevalensi stunting (Riskesdas 2013), dan tingkat kemiskinan (Susenas 2013) hingga terpilih minimal 1 kabupaten/kota dari seluruh provinsi. Sedangkan untuk pemilihan desa, ditentukan dengan melihat jumlah penduduk desa (data BPS dan Kemendagri tahun 2015), jumlah penduduk miskin desa (basis data terpadu BPS/TNP2K), tingkat kemiskinan desa (hasil perhitungan tingkat kemiskinan tahun 2014), dan penderita gizi buruk di desa selama 3 tahun terakhir. Dari perhitungan ini dipilih 10 desa di setiap kabupaten/kota kecuali Kepulauan Seribu (diambil seluruh desa yaitu 6 desa) dan sisa

4 desa dialokasikan ke Kabupaten Timor Tengah Selatan, Alor, Lembata, dan Tambrau masing-masing 1 desa. (Didik Budijanto. 2018)

Untuk dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka dibutuhkan dukungan seluruh sumber daya. Dalam pasal I ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dinyatakan bahwa sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Kemudian dalam 49 ayat (1) ditegaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan.

Dari regulasi tersebut menunjukkan bahwa bukan hanya pemerintah dan pemerintah daerah tetapi juga peran masyarakat sangat penting dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan. Sesuai amanah Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 18 menyatakan bahwa kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa, dari regulasi desa mempertegas adanya kewenangan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, termasuk pemberdayaan untuk mencegah dan menanggulangi stunting.

Kewenangan desa dan implikasinya yaitu desa berwenang untuk mengatur dan mengurus kegiatan berdasarkan hak asal usul dan kegiatan yang berskala lokal desa, desa berwenang untuk Mengurus kegiatan yang ditugaskan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi. Buku Saku Desa Dalam Penanganan Stunting. (Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah, Dan Transmigrasi, 2017). Dengan demikian Implikasi, Desa bisa menyelenggarakan pelayanan publik kesehatan yang berskala desa.

Potensi desa untuk penanganan stunting, merupakan prioritas pembangunan nasional melalui Rencana Aksi Nasional Gizi dan Ketahanan Pangan, Sesuai dengan UU tentang Desa, maka terhadap upaya penanganan stunting yang sudah menjadi prioritas nasional sangat memungkinkan bagi Desa untuk menyusun kegiatan-kegiatan yang relevan dan yang bersifat

skala desa melalui APBDes, Rujukan Belanja Desa untuk penangan stunting diperkuat dengan telah dikeluarkannya Permendesa No. 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Permendesa No 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 terkait Stunting. Bab III Pasal 7 Kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat meliputi dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak

Desa Lampoko Kecamatan Balusu Kabupaten Barru adaah salah satu yang telah melakukan pemberdayaan masyarakat dalam masalah stunting. Meskipun data menunjukkan angka stunting belum meningkat , tetapi pemerintah desa telah melakukan langkah-langkah antisifatif, dan penanggulangan stunting melalui gerakan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan pemerdayaan masyarakat oleh pemerintah desa dinilai penting karena sebagian masyarakat belum memahami bahaya stunting, bagaimana mencegahnya dan bagaimana penanganannya.

Berdasarkan hal itu, tulisan ini difokuskan untuk mendalami bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan stunting di Desa Lampoko Kecamatan Balusu Kabupaten Barru.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Dari kata tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan /kemampuan dari pihak yang memiliki daya atau pihak yang memiliki daya (Ambar Teguh Sulistiyani. 2004: 77)

Menurut Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato (2015: 28) bahwa pemberdayaan yaitu proses yang dilakukan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, terpingirkan) menjadi berdaya dengan memandirikan dan merubah kehidupan menjadi lebih baik dengan kemampuan yang dimiliki. Dengan memperoleh kesempatan atau mengakses sumberdaya dan layanan yang diperlukan untuk memperbaiki kualitas dan mutu hidupnya.

Kemudian dalam Pasal 1 , ayat (8)). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat

sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara .

Terkait dengan konsepsi pemberdayaan masyarakat desa , menurut Sunyoto Usman (2010: 31), usaha memberdayakan masyarakat desa serta menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan menjadi fenomena yang semakin kompleks, pembangunan pedesaan dalam perkembangannya tidak semata-mata terbatas pada peningkatan produksi pertanian. Pembangunan pedesaan juga tidak hanya cukup implementasi program peningkatan kesejahteraan sosial melalui distribusi uang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan dasar. Lebih dari itu adalah sebuah upaya dengan spektrum kegiatan yang menyentuh pemenuhan berbagai kebutuhan sehingga masyarakat dapat mandiri, percaya diri, dan tidak bergantung dan dapat lepas dari belenggu struktural yang membuat hidup sengsara

Menurut pandangan Wrihatnolo dan Dwijowijoto sebagaimana dikutip oleh Martua Hasiholan Bacin (2013) bahwa dalam pemberdayaan masyarakat memiliki tahapan, yaitu:

a. **Penyadaran,**

Target sasaran adalah pemberi pemahaman atau pengertian terhadap

masyarakat miskin bahwa mereka memiliki hak untuk lebih sejahtera.

b. Peningkatan Kapasitas

Peningkatan kapasitas bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat miskin, sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mengelola peluang yang akan diberikan. Tahap ini dilakukan untuk memberikan pelatihan, lokakarya dan kegiatan sejenis yang bertujuan untuk meningkatkan life skill untuk masyarakat miskin.

c. Pendayaan.

Masyarakat miskin diberikan kesempatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang dijalani dengan memberikan peran yang lebih besar secara bertahap sesuai dengan kapasitas dan kepekaannya.

Kemudian menurut Sumodiningrat dalam buku Ambar Teguh Sulistiyani (2004) menyatakan tentang "pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri dan kemudian lepas untuk mampu mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Ada 3 tahapan yang dilalui untuk sampai pada kondisi dimana masyarakat berdaya untuk mengembangkan dirinya sendiri, ketiga tahapan itu adalah:

a. Penyadaran, dan pembentukan

perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan meningkatkan kapasitas diri.

Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini pihak pemberdaya/ aktor/ pelaku pemberdaya berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Apa yang diintervensi dalam masyarakat sesungguhnya lebih pada kemampuan afektifnya untuk mencapai kesadaran konatif yang diharapkan. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat akan kondisinya saat itu, dan dengan demikian akan dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Sentuhan akan rasa ini akan membawa kesadaran masyarakat bertumbuh, kemudian merangsang semangat kebangkitan mereka untuk meningkatkan kemampuan diri dan lingkungan. Dengan adanya semangat tersebut diharapkan akan dapat menghantarkan masyarakat untuk sampai pada kesadaran dan kemauan untuk belajar. Dengan demikian masyarakat semakin

terbuka dan merasa membutuhkan pengetahuan dan ketrampilan untuk memperbaiki kondisi.

- b. Transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran didalam pembangunan. proses transformasi pengetahuan dan kecakapanketrampilan dapat berlangsung baik, penuh semangat dan berjalan efektif, jika tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan-ketrampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapanketrampilan dasar yang mereka butuhkan. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum mampu menjadi subjek dalam pembangunan.
- c. Peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan sehingga terbentuk inisiatif dan kemampuan inivatif untuk mengantarkan pola kemandirian. Merupakan tahap pengayaan atau peningkatan

intelektualitas dan kecakapan-kerampilan yang diperlukan, supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkunganya.

2. Upaya Pencegahan Stunting

Menurut Persatuan Ahli Gizi Indonesia (2018: 6) stunting atau pendek diartikan sebagai kondisi gagal tumbuh pada bayi (0-11 bulan) dan balita (12-59 bulan) akibat dari kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan sehingga anak pendek seusianya, kekurangan gizi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir, tetapi kondisi stunting baru nampak setelah anak berusia 2 tahun.

Stunting (kerdil) adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Balita stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan

kurangnya asupan gizi pada bayi. Balita stunting di masa yang akan datang akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. 2018)

Stunting ditandai dengan terlambatnya tumbuh kembang anak yang akan memberikan dampak pada kegagalan dalam mencapai tinggi. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir. Akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun.

Balita dikatakan pendek jika nilai z-score-nya Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) kurang dari -2SD/standar deviasi. (stunted) dan kurang dari -3SD (severely stunted). Balita stunted akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadi lebih rentan terhadap penyakit, dan dimasa depan dapat beresiko menurunnya tingkat produktivitas. Pada akhirnya, secara luas, stunted akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemiskinan (Persatuan Ahli Gizi Indonesia. 2018: 8)

Upaya pencegahan stunting merupakan salah satu target Sustainable Development Goals (SDGs) yang termasuk pada tujuan pembangunan berkelanjutan ke-2 yaitu menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030 serta mencapai ketahanan pangan. Target yang ditetapkan adalah menurunkan angka stunting hingga 40% pada tahun 2025.

Menurut Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. (2018) bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah menetapkan stunting sebagai salah satu program prioritas. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, upaya yang dilakukan untuk menurunkan prevalensi stunting di antaranya sebagai berikut:

a. Ibu Hamil dan Bersalin

- 1) Intervensi pada 1.000 hari pertama kehidupan;
- 2) Mengupayakan jaminan mutu ante natal care (ANC) terpadu;
- 3) Meningkatkan persalinan di fasilitas kesehatan;
- 4) Menyelenggarakan program pemberian makanan tinggi kalori, protein, dan mikronutrien (TKPM);

- 5) Deteksi dini penyakit (menular dan tidak menular);
- 6) Pemberantasan kecacingan;
- 7) Meningkatkan transformasi Kartu Menuju Sehat (KMS) ke dalam Buku KIA;
- 8) Menyelenggarakan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif; dan
- 9) Penyuluhan dan pelayanan KB.

b. Balita

- 1) Pemantauan pertumbuhan balita;
- 2) Menyelenggarakan kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita;
- 3) Menyelenggarakan stimulasi dini perkembangan anak; dan
- 4) Memberikan pelayanan kesehatan yang optimal.

c. Anak Usia Sekolah

- 1) Melakukan revitalisasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
- 2) Memperkuat kelembagaan Tim Pembina UKS;
- 3) Menyelenggarakan Program Gizi Anak Sekolah (PROGAS); dan
- 4) Memberlakukan sekolah sebagai kawasan bebas rokok dan narkoba

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono, (2017 : 9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian ini dilaksanakan di desa Lampoko selama 3 bulan. Penelitian ini difokuskan untuk memahami pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan stunting di Desa Lampoko Kecamatan Balusu Kabupaten Barru.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara geografis Desa Lampoko berada dalam posisi dengan koordinat : 119.671988 LS/LU -4.302479 BT/BB, Luas Wilayah 531,00 Ha, dengan batas-batas wilayah yaitu :

1. Sebelah Utara : Desa Balusu
2. Sebelah Selatan : Kelurahan Takkalasi
3. Sebelah Timur : Desa Balusu
4. Sebelah Barat : Selat Makassar

Berdasarkan data (2022) diperoleh keterangan bahwa Klasifikasi Desa Lampoko adalah Swasembada, dengan jumlah Pendapatan Kepala Keluarga Rp 1.500.000,00. Dari jumlah penduduk 2.805 Jiwa, (2022) terdapat Jumlah Kepala Keluarga 792. dari jumlah KK tersebut terdapat keluarga prasejahtera yaitu 45 keluarga. Kemudian dari sekian jumlah penduduk tersebut terdapat 11 orang perawat dan bidan/dukun bayi terlatih adalah 8 orang.

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Stunting Di Desa Lampoko Setelah selesai proses pengumpulan data ,telah diperoleh hasil penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Penyadaran,

Pada tahap penyadaran merupakan tahap awal dari rangkaian tahapan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan untuk membentuk perilaku sadar dan peduli sehingga masyarakat khususnya warga miskin dapat merasa membutuhkan peningkatkan kapasitas diri. Kegiatan pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pada

prinsipnya setiap orang mempunyai kemampuan untuk keluar dari kemiskinan., sepanjang adat niat yang sungguh-sungguh dan bersedia bekerja keras sesuai kemampuan yang dimiliki. Kesadaran ini perlu ditanamkan kepada masyarakat agar dengan kemampuan sendiri dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Upaya pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa melalui peningkatan kesadaran masyarakat agar terhindar dari stunting disampaikan oleh Kepala Desa Lampoko:

“Langkah awal yng kita lakukan untuk menyadarkan masyarakat agar dapat terhindar dari stunting adalah melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait dan tokoh masyarakat. Hasilnya disepakati bahwa harus dilakukan sosialisasi serentak dengan menggerakkan seluruh perangkat desa, Ketua RT, Kepala Dusun, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya untuk melakukan sosialisasi di berbagai tempat yang paling sering didatangi msyarakat, seperti tempat Ibadah atau pada acara keramaian dan lain-lain”

Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam aspek peningkatan kesadaran masyarakat adalah melalui sosialisasi secara serentak dengan memberdayakan perangkat desa dan tokoh masyarakat.

Upaya ini dilakukan di tempat-tempat umum dengan tujuan agar masyarakat dapat memahami stunting secara cepat dan dapat menjangkau masyarakat sebanyak-banyaknya.

Apa yang dilakukan pemerintah desa tersebut telah menunjukkan hasil dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memahami stunting dan meningkatnya kemampuan untuk dapat berusaha sendiri agar terhindar dari stunting. Hal ini diungkap oleh seorang ibu Rumah tangga:

“Saya ini tergolong warga yang tidak mampu, itu karena suami sebagai kepala keluarga sudah lama meninggal dunia, jadi kadang-kadang dari penghasilan yang terbatas, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga, Dengan sosialisasi oleh perangkat desa, saya mulai menyadari tentang pentingnya menjaga kesehatan agar anak-anak saya dapat terhindar dari stunting”

Dari tanggapan informan di atas menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi oleh pemerintah desa telah diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan sosialisasi stunting mereka mulai sadar bahwa menjaga kesehatan adalah sangat penting karena dapat terhindar dari stunting. Juga masyarakat mulai menyadari bahwa bantuan pemerintah hanya sementara, dan karenanya mereka telah berusaha dengan segala kemampuan mereka

sendiri. Dengan demikian tujuan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan keadaran telah berhasil mencapai tujuannya.

2. Tahap Transformasi Kemampuan, Pengetahuan dan Keterampilan

Pada tahap ini pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, kecakapan keterampilan (Skil) kepada masyarakat. Peningkatan kemampuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajak para warga untuk mengikuti pelatihan pencegahan dan penanggulangan stunting dengan tujuan agar memiliki pengetahuan, pemahaman dan keterampilan sendiri, tanpa harus terus mengharap bantuan dari orang lain atau bantuan dari pemerintah. Upaya transformasi pengetahuan ini ditujukan kepada pihak tertentu termasuk kader Posyandu atau langsung kepada masyarakat umum.

Dalam pemberdayaan masyarakat terkait transformasi kemampuan kepada masyarakat juga telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Lampoko. Seperti tanggapan dari salah perangkat desa :

“Saya kira upaya peningkatan kemampuan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi stunting sudah dilakukan oleh pemerintah desa,. Bentuknya adalah mengikutkan pelatihan para kader

posyandu. Tujuannya agar mereka memiliki kemampuan sumber daya manusia yang dapat langsung dipraktekkan di Posyandu sekaligus dapat meneruskan keterampilannya kepada masyarakat yang dilayani”

Dari pernyataan informan itu dapat diketahui bahwa dalam proses transformasi kemampuan pencegahan dan penanggulangan stunting oleh pemerintah desa dilakukan dengan memberdayakan kader poyandu melalui pelatihan. Hasil dari pelatihan tersebut, para kader poyandu akan memiliki pengathuan dan keterampilan dalam melakukan pelayanan kesehatan di Posyandu. Dengan kemampuan itu pula sekaligus para kader Poyandu dapat menyampaikan kepada masyarakat tentang teknis pencegahan dan penanggulangan stunting sehingga masyarakat sendiri akhirnya memiliki keterampilan mengenai stuting.

Bagaimana upaya pemerintah desa dalam mentransfer kemampuan pencegahan dan penanggulangan stunting yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat, dijawab oleh seorang Ibu PKK :

“Mencegah dan menanggulangi stunting itu sangat penting dipahami masyarakat. Oleh karena itu kita telah mengundang masyarakat untuk mengikuti pelatihan baik di kantor desa maupun di seluruh Posyandu. Pelatihan ini dilaksanakan melalui

kerja sama dengan Kader posyandu, Puskesmas, kelompok dasa wisma dan ibu-ibu PKK, yang semuanya dikoordinir oleh pemerintah desa. Sasarannya bukan hanya masyarakat umum tetapi juga kepada ibu hamil. Meskipun pelatihannya cukup sederhana dengan sarana seadanya, tetapi masyarakat cukup antusias mengikutinya sehingga hasilnya cukup memuaskan”

Mencermati penjelasan tersebut, dapat memberikan gambaran bahwa pemerintah desa dalam mentransfer kemampuan pencegahan dan penanggulangan stunting secara langsung kepada masyarakat dilakukan dengan menggerakkan kerja sama dengan Kader posyandu, Puskesmas, kelompok dasa wisma dan ibu-ibu PKK untuk melakukan pelatihan kepada masyarakat. Kegiatan pelatihan ini cukup efektif karena dilakukan di kantor desa atau di Posyandu dimana merupakan tempat pelayanan utama masyarakat. Meskipun pelatihannya cukup sederhana, namun hasilnya cukup menggembirakan karena telah meningkatkan kemampuan masyarakat termasuk ibu hamil, tentang teknis pencegahandan penanggulangan stunting.

Secara substantif dari pelatihan ini masyarakat desa diajak mengikuti proses pembelajaran tentang pengetahuan tentang apa itu stunting,

apa penyebab terjadinya stunting, dan pencegahan dan penanggulangan stunting yang efektif yang dilakukan pada seribu hari pertama kehidupan. Selain itu mereka dapat memahami bagaimana makanan yang bergizi, air, sanitasi dan kebersihan lingkungan dan hal lainnya. Dengan begitu akan menstimulasi munculnya keterbukaan wawasan untuk dapat menguiasai keterampilan teknis untuk memenuhi kebutuhan kesehatan mereka.

3. Tahap Pendayaan

Ketika tahap penyadaran dan tranformasi kemampuan sudah dilalui, maka langkah terakhir dari pemberdayaan masyarakat adalah tahap pendayaa. Pada tahap pendayaan ini ditunjukkan untuk meningkatkan kemampuan intelektual dan kecakapan, keterampilan masyarakat kelompok sasaran dengan target agar mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian berdasarakan potensi yang dimiliki sendiri. Jika tahap pendayaan ini memecapai tujuannya , maka akan ditandai dengan adanya kemampuan masyarakat sendiri didalam membangun inisiatif, melahirkan kreasi dan bahkan mampu membuat inovasi didalam lingkungannya,

Terkait dengan pemberdayaan dalam aspek pendayaan masyarakt

yang dilakukan oleh pemerintah Desa lampoko, diperoleh keterangan dari salah seorang Ibu Anggota Dasa Wisma:

“Sebelumnya saya kurang mengerti apa itu stunting, Tetapi dengan sering mengikuti pelatihan saya sudah bisa memahami bahwa jika ada niat ternyata stunting cukup mudah untuk dihindari dan diatnggulangi. Ketika mau melahirkan harus ditolong oleh bidan atau dokter terlatih, karena sebelumnya dibatu oleh dukung beranak. Kemudian begitu bayi lahir, kita sebaiknya melakukan Inisiasi Menyusu Dini, selanjunya Bayi sampai dengan usia 6 bulan diberi ASI saja kemudian ditambah makanan. Dan semua itu sudah dapat saya lakukan sendiri, tanpa dibantu orang lain”

Dari ungkapan informan di atas, dapat dipahami bahwa pada apek pendayaan,maka pemberdayaan masyarakat telah berhasil sesuai tujuannya. Hal ini dapat dilihat bagaimana seorang ibu yang sebelumnya tidak tahu apa-apa soal stunting, tetapi stelah ikuti pelatihan akhirnya sudah mampu. memahami secara rinci masalah stunting, bahkan sudah dapat dilakukan sendiri dengan upaya sendiri bagaimana pencegahan dan penanggulangan stunting.

Kemudian agar dapat dipahami lebih jauh bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui tahap pendayaan, diperoleh keterangan dari salah seorang

Ibu Rumah Tangga :

“Saya tergolong warga miskin, jadi saya selalu mengharap mendapat bantuan sosial dari pemerintah. tetapi kemudian saya menyadari bahwa bantuan pemerintah yang saya terima selama ini hanya sifatnya sementara. Karena itu saya telah membuka usaha kecil-kecilan dengan harapan saya mampu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak agar terhindar dari stunting dan kemudian bisa menyekolahkan mereka dengan menggunakan penghasilan sendiri. Kalupun masih ada bantuan dari pemerintah saya syukuri, tetapi mulai sekarang saya bertekad untuk mampu berdikari tanpa mengharap uluran tangan orang lain karena itu menurunkan harga diri”

Dari pernyataan itu dapat dipahami bahwa kebiasaan warga miskin untuk menerima bantuan dari pemerintah di satu sisi selalu menjadi harapan mereka, tetapi di sisi lain membuat masyarakat “ketagihan’ sehingga kurang berusaha sendiri memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat menjadi suatu strategi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan. Apabila masyarakat telah mencapai tahap pendayaan, maka masyarakat dapat secara mandiri memenuhi kebutuhannya, termasuk kebutuhan pemeliharaan kesehatan dari stunting.

Dari seluruh urian di atas

memperlihatkan bahwa Pemerintah Desa Lampoko, telah melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan stunting. Hal ini terlihat dari wujud nyata konsep pemberdayaan, dimana pemerintah desa telah melakukan tahapan pemberdayaan mulai dari tahap penyadaran, transformasi kemampuan, pengetahuan dan keterampilan serta tiba pada tahap terakhir yaitu pendayaan masyarakat.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian, pengelolaan data, dan analisis yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan hasil penelitian, yaitu:

1. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lampoko Kecamatan Balusu Kabupaten Barru dalam mencegah dan menanggulangi stunting dilakukan secara bersama-sama dengan puskesmas, kader Posyandu, kelompok dasa wisma, Ibu PKK dan tokoh masyarakat desa.
2. Pemberdayaan masyarakat telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Lampoko Kecamatan Balusu Kabupaten Barru melalui 3 tahapan yakni: penyadaran masyarakat, transformasi

kemampuan pengetahuan masyarakat dan keterampilan, dan pendayaan masyarakat. Seluruh tahapan pemberdayaan tersebut telah berhasil meningkatkan kemampuan masyarakat berdasarkan potensi masyarakat sendiri untuk memhami stunting tentang bagaimana pencegahan daan penanggulangannya. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi stunting yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lampoko Kecamatan Balusu Kabupaten Barru telah berjalan dengan cukup baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ambar Teguh Sulistiyani. 2004. *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan* Yogyakarta: Gava Media,
- Buku Saku *Desa Dalam Penanganan Stunting*. 2017. Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Jakarta :
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Warta Kesmas; Gizi Investasi Masa Depan Bangsa*. Jakarta.
- Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi), 2018. *Stop Stunting dengan Konseling Gizi*, Jakarta:Penebar Plus,

Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. 2018. *Situasi Balita Pendek (Stunting) Di Indonesia* . Jakarta

Sekertariat Wakil Presiden Repblik Indonesia. 2021. *Perpres Nomor 72 tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting*. Jakarta.

Sunyoto Usman. 2010. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2017. *100 Kabupaten/ Kota Prioritas Untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting)*. Sekertariat Wakil Presiden Repblik Indonesia. Jakarta.

Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal Ilmiah

- Ari Sulistyawati. *Factor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita*, Jurnal Ilmu Kebidanan, Jilid 5, No 1
- Sri Astuti1 dkk. 2018. *Gerakan Pencegahan Stunting Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang*. Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat Vol. 7, No. 3, September 2018: 185 - 188 ISSN 1410 - 5675.

Siti Haryani dkk. 2021. *Pencegahan Stunting Melalui Pemberdayaan Masyarakat Dengan Komunikasi Informasi Dan Edukasi Di Wilayah Desa Candirejo Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang*. Jurnal Pengabdian Kesehatan STIKES Cendekia Utama Kudus P-ISSN 2614-3593 E-ISSN 2614-3607 Vol. 4, No. 1, Januari 2021.

Uliyatul Laili, Ratna Ariesta Dwi Andriani. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Stunting*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks Vol. 5 No.1 Juni 2019. e-ISSN:2528-116X p-ISSN:2527-5216s

Dokumen Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.